

Peran BUMDes Dalam Menjadikan Suatu Desa Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan)

The Role of BUMDes in Turning a Village Into an Independent Village in Musi Rawas (South Sumatra Province)

Dyah Hapsari Eko Nugraheni^{1*}, Andy Alfatih¹, Diana Dewi Sartika¹, Randi Randi¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indralaya 30662,
Sumatera Selatan Indonesia

*)Penulis untuk korespondensi: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id

Sitasi: Nugraheni DHE, Alfatih A, Sartika DD, Randi R. 2021. The role of BUMDes in turning a village into an independent village in Musi Rawas (South Sumatra Province). *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021.* pp. 269-278. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

Musi Rawas Regency, based on data from the P3MD Secretariat (Village Community Empowerment Development Program) as of September 2019 there are approximately 183 BUMDes business units. This research aims to obtain the results of evaluation of the successes and failures in the establishment of BUMDes, in order to obtain alternative models for the implementation of the next BUMDes establishment, in line with the research roadmap that has been compiled. Data collection techniques are carried out by means of the dissemination of questionnaires, interviews, observations and documentation with data analysis used, namely descriptive and explanatory statistical techniques. The establishment of BUMDes is considered important because it has a role as a bridge to create the welfare of the village community through an independent village making the village more financially empowered. This means that BUMDes has an important and beneficial role for the welfare of villagers. The issue of the successful establishment of BUMDes in some villages became booming and a warm discourse in other villages, which also wanted to establish BUMDes, as well as BUMDes in some villages that have not succeeded. Therefore, this study can be an input for other villages that do not have BUMDes, including villages that already have BUMDes but have not developed properly.

Keywords: role of BUMDes, village, mandiri

ABSTRAK

Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan data dari Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) per September 2019 terdapat lebih kurang 183 unit usaha BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pendirian BUMDes, guna mendapatkan model alternatif bagi implementasi pendirian BUMDes selanjutnya, sejalan dengan peta jalan penelitian yang telah disusun. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara, observasi serta dokumentasi dengan analisis data yang digunakan yaitu teknik statistik deskriptif dan eksplanatif. Pendirian BUMDes dianggap penting karena memiliki peran sebagai jembatan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa melalui desa yang mandiri menjadikan desa lebih berdaya dari segi financial. Artinya BUMDes memiliki peran penting dan bermanfaat bagi kemashlahatan warga desa. Isu keberhasilan pendirian BUMDes di beberapa desa menjadi *booming* dan wacana hangat di desa-desa

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-623-399-012-7

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

lainnya, yang juga ingin mendirikan BUMDes, maupun BUMDes di beberapa desa yang belum berhasil. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi input bagi desa-desa lainnya yang belum memiliki BUMDes, termasuk desa yang telah memiliki BUMDes tetapi belum berkembang dengan baik.

Kata kunci: peran BUMDes, desa, mandiri

PENDAHULUAN

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga disebutkan dalam undang-undang sebelumnya, UU 22/1999 dan PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di desa. BUMDes dikembangkan berdasarkan potensi desa, dan agar keberadaannya tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu (sejenis tengkulak, ijon dan lain-lain), maka kepemilikannya dimiliki bersama oleh suatu desa dan dikontrol bersama dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, (Tim Penyusun, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2007).

Kebijakan publik, pada dasarnya merujuk pada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, untuk kepentingan publik. 1) Selama sumber-sumber publik menjadi fokus, kebijakan publik menjadi infrastruktur yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber publik. Tanpa kebijakan, pemanfaatan sumber-sumber publik adalah bertentangan dengan hukum. (Alfatih, 2015 : 2), menyatakan bahwa kebijakan publik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, menyelesaikan masalah publik, melakukan pemberdayaan, yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan sosial ke dalam kenyataan.

Nugroho, (2016) mendefinisikan administrasi publik ke dalam 5 tingkatan, yaitu Birokrasi, Pemerintah, Negara, *Governance*, dan *Global Governance*. Administrasi Publik dalam makna Pemerintah juga membuat Kebijakan Publik. Sebagai contoh, Presiden (Pemerintah/Eksekutif) membuat Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan lain-lain. Pembuatan Kebijakan Publik oleh Administrasi Publik (Pemerintah/Eksekutif) ini dalam usaha memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan sosial, termasuk juga kebijakan pendirian BUMDes.

Oleh karena itu, tidak mengherankan saat ini banyak desa yang telah mendirikan BUMDes di berbagai pelosok desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumsel. Namun demikian, meskipun di beberapa kabupaten/kota di Sumsel, telah marak didirikan BUMDes, akan tetapi terdapat kabupaten/kota yang tidak memiliki BUMDes sama sekali karena merupakan wilayah perkotaan, yang tidak memiliki desa, melainkan kelurahan, misalnya Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Adapun, keberadaan BUMDes di Provinsi Sumsel, salah satunya direpresentasikan melalui BUMDes yang berada di Kabupaten Musi Rawas, yaitu sebanyak 183 BUMDes dari 185 desa, Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa), 2019 (Tabel 1).

Kajian oleh Sumiasih (2018), dengan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-undang Desa dan menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode kajian menggunakan perspektif hukum empiris. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes setelah berlakunya Undang-undang Desa mengalami perkembangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang memiliki potensi wisata, tetapi belum mendirikan BUMDes. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha serta kurang

maksimalnya pendampingan dari pihak terkait, khususnya pemerintah. Adapun bentuk pengelolaan salah satu BUMDes yaitu BUMDes Pakse Bali adalah dengan memfokuskan pada sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga bisa dijadikan role model bagi desa lain yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola potensi wisata di desanya.

Kajian terkait implementasi BUMDes paling tidak terlihat pada kajian (Sufi & Saputra, 2017). Kajian ini melihat implementasi program pemberdayaan desa dalam mendukung BUMDes, di Desa Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara kepada para informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program BUMDes Karya Bersama cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, kurangnya transparansi dan kejelasan dari pihak penyelenggara keuangan, serta kurangnya peran fasilitator desa dalam memfasilitas pengambilan keputusan.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat akan memberi nilai positif bagi pendapatan asli Desa dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pengelolaan BUMDes yang dijalankan dengan baik didasari kerjasama dan semangat untuk membangun desanya akan membuktikan bahwa desa mampu mandiri tanpa menunggu bantuan yang datang dari pusat. Dalam mewujudkan desa yang maju ,kuat, serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak.

Pengelolaan BUMDes merupakan basis yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat desa dengan dimanfaatkannya potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia .BUMDes juga memiliki andil dalam menumbuhkan nilai-nilai sosial lokal serta memberikan keberpihakan dan peduli terhadap kelompok yang terpinggirkan sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif dan berdaya guna.

Tabel 1. Jumlah BUMDes di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
STL Ulu Terawas	12	12
Jayaloka	12	12
BTS Ulu Cekar	18	18
Muara Kelingi	20	20
Tugumulyo	17	17
Muara Beliti	11	11
Muara Lakitan	19	17
Megang Sakti	19	19
Selangit	11	11
Purwodadi	9	9
Tiang Pumpung Kepungut	10	10
Tuah Negeri	11	11
Sumber Harta	9	9
Sukakarya	8	8
Jumlah	185	183

Sumber : Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Berlatar belakang dari semuanya itu maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa memang ada Peran BUMDes Dalam Menjadikan Suatu Desa Menjadi Desa Mandiri di kabupaten Musi Rawas. Kajian terkait

dampak keberadaan BUMDes ini pada akhirnya ditujukan untuk mendapatkan hasil evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pendirian BUMDes, guna mendapatkan model alternatif bagi implementasi pendirian BUMDes selanjutnya, sejalan dengan peta jalan penelitian yang telah disusun.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian yang sudah dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dan merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Neuman, 1997 :63). Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2016). Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini (Tabel 2) adalah data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 40 Badan Usaha Milik Desa. Dari Tabel 2 jelas bahwa peran pemerintah sangat penting dalam peningkatan BUMDes di Musi Rawas. Baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan BUMDes secara mandiri. Disamping itu kemajuan usaha juga dirasakan oleh BUMDes yang ada di kabupaten Musi Rawas berikut diagram lingkaran.

Aspek ekonomi terkait dengan kemajuan usaha, 77% informan sepakat bahwa BUMDes yang mereka kelola mengalami kemajuan. Kamajuan ini dapat didukung dari beberapa faktor yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan ada asosiasi yang diikuti oleh BUMDes, salah satu asosiasi yang diikuti adalah Forum BUMDes Indonesia di kabupaten Musi Rawas. Sehingga dengan bantuan tersebut BUMDes di Musi Rawas 100% mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalani. Meskipun banyak BUMDes baru mengalami pergantian kepengurusan namun BUMDes terus berjalan dan mendapatkan keuntungan, hal ini dibuktikan dengan semenjak kepemimpinan baru BUMDes tetap mengalami perkembangan yaitu sebesar 100% informan menyatakan mendapatkan peningkatan.

Keberadaan BUMDes bagi masyarakat adalah sebuah solusi yang ditawarkan dalam kondisi masyarakat yang susah dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan, dengan menjadi konsumen maka secara tidak langsung BUMDes dan masyarakat saling menguntungkan. Masyarakat terbantuan dengan keberadaan BUMDes. Peran masyarakat tidak kalah penting dalam proses perkembangan BUMDes. Masyarakat adalah aktor yang cukup penting bagi BUMDes. Menurut Putra (2005) dalam (Suharto, 2007) aktor menjadi hal yang terpenting dalam setiap kebijakan, Putra (2005) membagi stakeholder dalam tiga kelompok yaitu: 1) Stakeholder kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan, 2) stakeholder primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek, 3) stakeholder: mereka yang yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki pedulian dan perhatian sehingga mereka turut berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh desa harus didukung oleh pemerintah daerah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan (Randi *et al.*, 2021).

*Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021
"Sustainable Urban Farming Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Pandemi"*

Tabel 2. Peran pemerintah dalam peningkatan BUMDes di Musi Rawas

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
ASPEK EKONOMI: PENINGKATAN MODAL USAHA							
1	Bantuan Modal	1	0	0	25	14	40
2	Bantuan Pelatihan	26	14	0	0	0	40
3	Bantuan pendampingan	39	0	1	0	0	40
4	Bantuan Usaha pihak lain	0	13	0	17	10	40
5	Pinjaman Usaha untuk pengembangan	0	0	4	19	17	40
EKONOMI: KEMAJUAN USAHA							
6	Perbaikan tempat usaha	31	8	0	1	0	40
7	Produk usaha meningkat	22	12	0	6	0	40
8	Teknologi, peralatan, perlengkapan dan usaha	17	0	1	18	4	40
9	Pemasaran Produk makin luas	15	1	2	15	7	40
10	Permintaan Pasar luas	33	0	2	3	2	40
ASPEK EKONOMI: KEUNTUNGAN USAHA							
11	Usaha menguntungkan	40	0	0	0	0	40
12	Keuntungan usaha meningkat	25	15	0	0	0	40
ASPEK SOSIAL: KETERKAITAN SOSIAL DENGAN BUMDES							
13	Memiliki jabatan penting	39	1	0	0	0	40
14	Masyarakat respek pada jabatan	36	1	3	0	0	40
15	Peningkatan usaha sejak memimpin	40	0	0	0	0	40
ASPEK SOSIAL: KEIKUTAN ASOSIASI							
16	Bergabung dengan asosiasi	34	0	0	1	5	40
17	Menjadi jabatan/pengurus di asosiasi	0	0	0	24	16	40
18	Asosiasi tingkat kabupaten	35	0	0	2	3	40
ASPEK SOSIAL: TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BUMDES							
19	Masyarakat mendukung BUMDes	21	19	0	0	0	40
20	Masyarakat tidak peduli sama BUMDes	0	0	4	13	23	40
21	Masyarakat menolak BUMDes	0	0	0	25	15	40
ASPEK LINGKUNGAN: KETERSEDIAAN BAHAN BAKU USAHA							
22	Bahan baku dari desa	12	5	4	3	16	40
23	Bahan baku alam	5	3	16	11	5	40
24	Kemudahan mendapatkan produk	13	9	2	7	9	40
ASPEK LINGKUNGAN: PERLAKUAN SISA BAHAN BAKU PRODUKSI							
25	Menyisahkan bahan baku (limbah)	0	22	3	9	6	40
26	Limbah bahan baku di daur ulang	0	20	11	6	3	40
27	Limbah dibuang sembarang	0	1	7	16	16	40
ASPEK POLITIK: KETERLIBATAN UNSUR PARPOL							
28	Unsur parpol pendirian BUMDes	0	0	0	0	40	40
29	Bentuk keterlibatan parpol	0	0	0	0	40	40
30	Unsur parpol intens	0	0	0	0	40	40
ASPEK POLITIK: AFILIASI/MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PARPOL							
31	Hubungan khusus dengan parpol	0	0	0	0	40	40
32	Pengurus dari parpol	0	0	0	0	40	40
33	BUMDes mewakili kepentingan parpol	0	0	0	0	40	40
34	Pengarah yang mengarah ke parpol	0	0	0	0	40	40

Sumber: Data lapangan diolah peneliti, 2020

Bentuk keterlibatan perangkat dan masyarakat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dan untuk mengetahui kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam dalam kegiatan BUMDes masih kurang. Hal ini disebabkan karena belum memadainya pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes. Sementara, pola pemanfaatan dana BUMDes lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik di desa, oleh karena itu kontribusi BUMDes sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan minim (Prasetyo & Ratna, 2017).

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-623-399-012-7

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)



Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020

Adapun dari aspek pendampingan, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada BUMDes sehingga dengan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah BUMDes mengalami peningkatan baik kemandirian maupun keuntungan BUMDes. Data diatas adalah hasil dari lapangan yang diolah oleh peneliti. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan bantuan kepada BUMDes. Beberapa bantuan yang diberikan adalah berupa pendampingan, pelatihan dan modal. Aspek ekonomi peningkatan modal usaha BUMDes di kabupaten Musi Rawas cukup baik yaitu BUMDes banyak mengalami peningkatan setelah adanya bantuan pendampingan dari pemerintah.

Kebijakan publik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, menyelesaikan masalah publik, melakukan pemberdayaan, yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan sosial ke dalam kenyataan (Alfatih, 2015 : 2). Alfatih, (2019 dengan melihat aspek implementasi pendirian BUMDes di beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas. Desa-desa di Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes sehingga dapat memupuk kemandirian desa dan membuat desa lebih berdaya dari segi finansial. Artinya BUMDes memiliki peran penting dan bermanfaat bagi kemashlahatan warga desa. Sayangnya, belum semua desa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi BUMDes. Oleh karena itu, kajian ini akan lebih spesifik melihat bagaimana dampak keberadaan BUMDes di beberapa desa yang sudah ada di Kabupaten Musi Rawas termasuk peluang keberhasilan dan kegagalan BUMDes yang telah didirikan.

Bila digambarkan dalam diagram lingkaran bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dengan jumlah 97% informan sepakat bahwa BUMDes mendapatkan bantuan pendampingan. Bantuan pendampingan ini dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes untuk mengembangkan BUMDes. Sehingga BUMDes mandiri secara ekonomi. Pendirian BUMDes tidak terlepas dari potensi desa yang mungkin selama ini belum tergali. Oleh karena itu, kajian (Sidik, 2015), memperlihatkan bagaimana kemudian potensi desa ini digali atau dikembangkan guna mewujudkan kemandirian desa. Dengan kebijakan pendirian BUMDes sedikit tidaknya memebrikan keuntungan bagi masyarakat desa. BUMDes adalah satu bentuk implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) bahwa kebijakan

ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan yang dilihat dari isi dan konteks kebijakannya (Wibawa *et al.*, 1994).



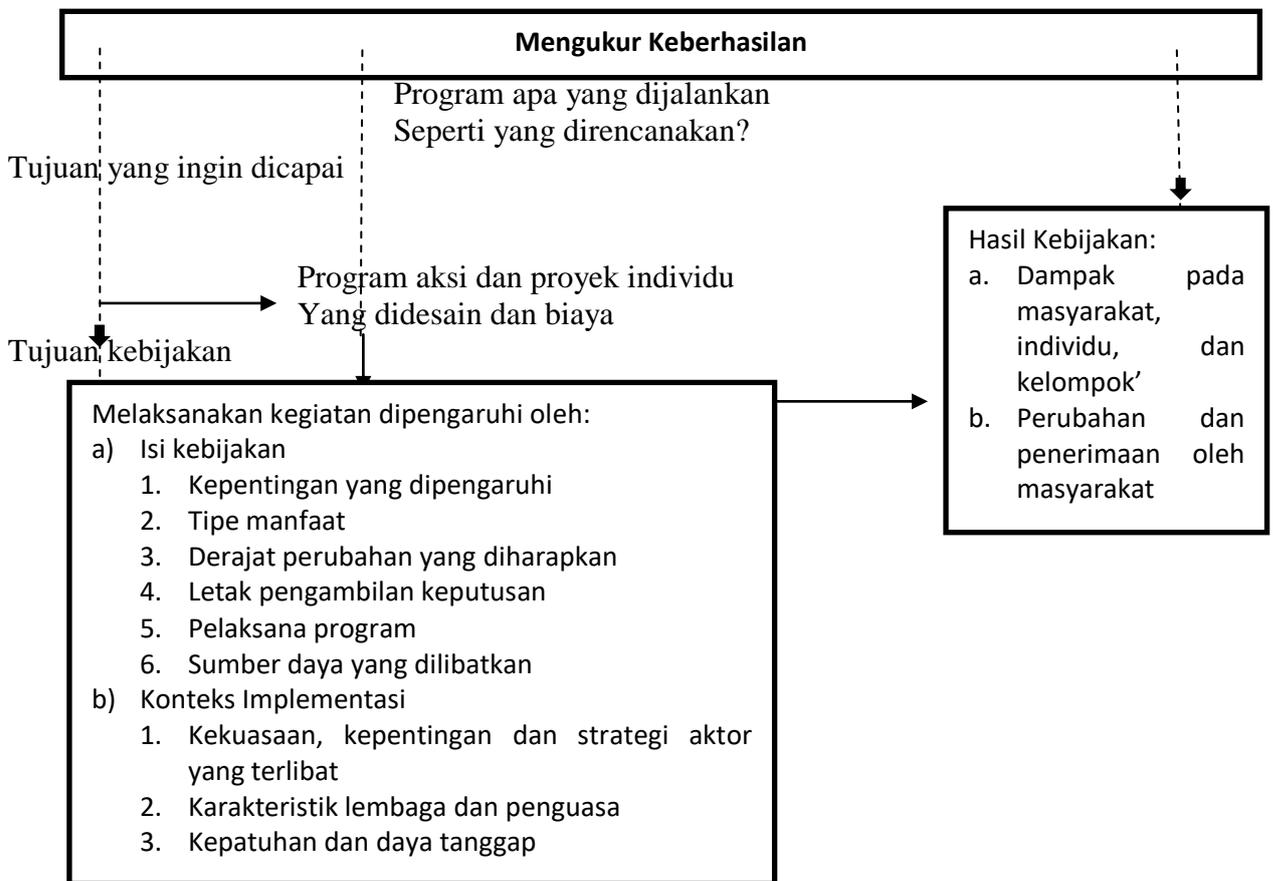
Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020

Implementasi yang akan dilakukan dalam isi kebijakan adalah; (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, dalam hal ini kebijakan memberikan manfaat yang actual (bukan hanya forma, ritual, dan simbolis), (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses Implementasi sebagaimana pengaruh dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya; (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keberhasilan penataan ekonomi kreatif dan pariwisata harus sertakan dengan kondisi lingkungan dan sosial yang baik, sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat mampu menerima wisatawan dari luar desa (Randi *et al.*, 2020). Disamping itu juga Kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari hasil evaluasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan yang dilihat dari isi dan konteks kebijakannya (Wibawa *et al.*, 1994).

Implementasi yang akan dilakukan dalam isi kebijakan adalah; (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, dalam hal ini kebijakan memberikan manfaat yang actual (bukan hanya forma, ritual, dan simbolis), (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses Implementasi sebagaimana pengaruh dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya; (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Implementasi adalah tahap melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada public mengenai pilihan

kebijakan yang diambil, instrument kebijakan yang digunakan, staf yang melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang diberikan, anggaran yang telah disiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Suharto, 2007) (Gambar 1).

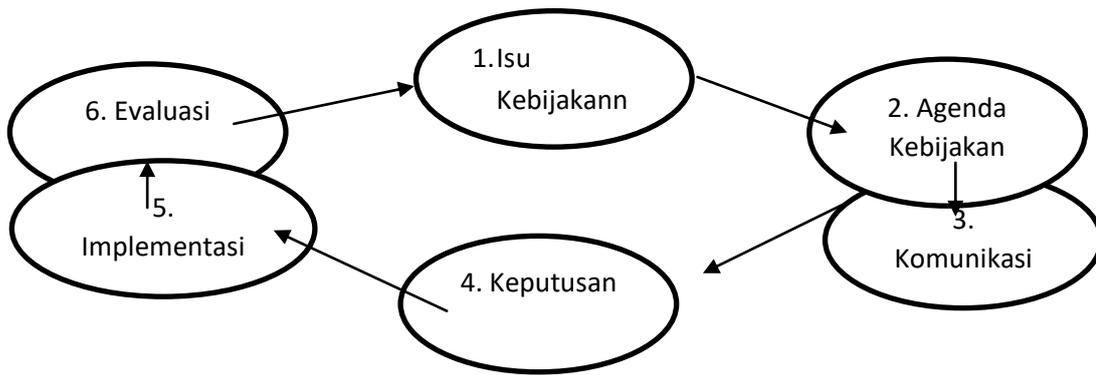


Gambar 1. Model implementasi kebijakan menurut Grindle, modifikasi

Menurut Putra (2005) dalam (Suharto, 2007) aktor menjadi hal yang terpenting dalam setiap kebijakan, Putra (2005) membagi stakeholder dalam tiga kelompok yaitu: 1) Stakeholder kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan, 2) stakeholder primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek, 3) stakeholder: mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki pedulian dan perhatian sehingga mereka turut berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Implementasi harus didasari oleh proses logis sehingga penting untuk dipahami proses logis dalam proses perumusan kebijakan. Berikut lingkaran kebijakan (Gambar 2).

Keenam lingkaran kebijakan diatas merupakan tahapan yang penting dilakukan untuk keberhasilan sebuah kebijakan, keberhasilan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan public serta dapat diterima oleh public (Aneta, 2010). Implementasi kebijakan sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan dimana keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, keempat faktor ini sangat penting (Akib, 2010). Keempat factor tersebut memiliki persamaan dengan lingkaran kebijakan, namun lingkaran kebijakan

melalui enam tahapan sehingga dirasa dibutuhkan waktu untuk menyusun sebuah kebijakan.



Gambar 2. Lingkaran kebijakan (Suharto, 2007)

KESIMPULAN

Isu keberhasilan pendirian BUMDes di beberapa desa menjadi *booming* dan wacana hangat di desa-desa lainnya, yang juga ingin mendirikan BUMDes, maupun BUMDes di beberapa desa yang belum berhasil. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi input bagi desa-desa lainnya yang belum memiliki BUMDes, termasuk desa yang telah memiliki BUMDes tetapi belum berkembang dengan baik. BUMDes merupakan jembatan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes memberikan peran yang cukup besar dalam mewujudkan kemandirian desa jika pengelolaan BUMDes berada di tangan orang-orang yang tepat. Peranan BUMDes dianggap penting sebagai alternatif untuk mereduksi tingkat kemiskinan khususnya di pedesaan sehingga masyarakat desa menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian BUMDes dapat menjadi sarana ataupun model strategis dalam program pengentasan kemiskinan mengingat BUMDes dianggap berhasil dalam mengelola semua potensi yang berada di desa dan hasil tersebut akan dapat menguntungkan bagi masyarakat desa itu sendiri dan dapat mendorong terwujudnya desa yang lebih mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Sriwijaya telah membantu dalam pendanaan penelitian ini dan terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan FISIP UNSRI yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih A. 2015. *Program Implementation and Community Empowerment*. Unpad Press: Bandung.
- Alfatih A. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018. Laporan Penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas.
- Akib H. 2010. Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi*. 1(1).
- Aneta A. 2010. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1).

- Creswell, J. W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kudeantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Nugroho RD. 2016. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.
- Prasetyo, Ratna A. 2017. Peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*. XI(1): Maret 2016.
- Randi, Kholek A, Izzudin M. 2020 Pengembangan tata kelola pariwisata di desa Tanjung Medang (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes). *In: Proceedings Seminar Nasional AVoER XII 2020 Palembang, 18-19 November 2020 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya*.
- Randi, Junaidi, Mulyanto, Ridhah T. 2021. Potensi Calon Tenaga Kerja Pemuda Desa di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Masa Pandemi Covid'19. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-0040
- Sidik F. 2015. Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 19(2). DOI: 10.22146/jkap.7962.
- Suharto E. 2007. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Sumiasih K. 2018. Peran BUMDes dalam pengelolaan sektor pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 7(4): Desember 2018.
- Sufi W, Saputra T. 2017. Implementation of Village Empower Program In Supporting Form of Institutions of Village Business Institution (BUMDes). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 5(2). DOI: 10.1234/ppd.v5i2.4420.
- Tim Penyusun. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Wibawa S, Purbokusumo Y, Pramusinto A. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.